

Pengecualian rahasia bank pada bank konvensional dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang = Exception of conventional bank secrecy in Law No. 9 of 2017 regarding stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 year 2017 regarding access to financial information for tax purposes to become a law

Anisa Farida Amalia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467813&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**  
Dalam rangka mencegah penghindaran pajak, G20 setuju untuk memberlakukan Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI dimana negara-negara G20 saling membuka data finansial di negaranya dan saling bertukar informasi keuangan. Sebagai pemenuhan syarat AEOI Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut bank ada dalam persimpangan antara tugasnya memegang teguh rahasia bank dan di sisi lain bank harus secara sukarela memberikan data nasabah kepada aparat pajak. Tesis ini membahas pengecualian rahasia bank sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 serta benturan kepentingan rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah dan untuk kepentingan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi komparatif dan berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan terkait ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, dimana dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, khusus untuk kepentingan perpajakan, ketentuan rahasia bank telah dihapuskan. Antara rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah penyimpan dengan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tidak terdapat benturan kepentingan dikarenakan sifat relatif rahasia bank di Indonesia. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap nasabah tetap ada dalam bentuk pasal yang menjamin bahwa data nasabah tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan serta ancaman sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data nasabah tersebut. Dengan keterbukaan rahasia bank tersebut Notaris harus lebih berhati-hati dan memastikan itikad baik kliennya, serta memberitahukan klien agar nilai transaksi yang tercantum dalam akta harus sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya.

**ABSTRACT**  
In order to prevent tax evasion, G20 has committed to Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI where G20 countries disclose their financial data and exchange their financial information to each other. As a condition of AEOI, Indonesian Government has issued Law No. 9 Year 2017 which regulates access to financial information. With such law, bank is in the intersection between its duty to keep its bank secrecy and to voluntarily provide customers' data to the tax authority. This thesis aims to compare the exception of conventional bank secrecy, before and after Law No. 9 Year 2017 and also to analyze the clash of interests between bank's duties to protect their customers and to open bank secrecy for the benefit of taxation. Using juridical normative research method with comparison research typology. The results showed the similarities and differences regarding the provisions of bank secrecy for tax purposes, where with such significant changes,

specifically for the purposes of taxation, bank secrecy has been abolished. Between bank secrecy as a legal protection for bank's customers and the exception of bank secrecy for tax purposes do not have conflict of interest due to the relative nature of bank secrecy. However, the legal protection of the bank's customers remain in the form of clause ensuring that the customer's data will only be used for tax purposes as well as the threat of sanctions are provided to those who are misusing such customer's data. With the disclosure of bank secrecy, Notaries have to be more careful and ensure their clients' good faith and they must also notify their clients that the transaction value contained in the deed must be matched with the actual transaction value.